

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat luar biasa jika dilihat dari potensi perikanan tangkap. Menurut Kamaluddin¹, potensi perikanan tangkap Indonesia diperkirakan 6,7 juta ton per tahun, sementara tingkat pemanfaatannya baru mencapai 59 persen dari potensi lestarnya. Sementara itu, menurut Prof. Dr. Ir. H. Rokhim Dahuri, MS, potensi ekonomi menyimpan kekayaan senilai US\$ 1,2 triliun pertahun. Potensi ini membuka peluang bagi 40 juta lebih penduduk. Namun, potensi kelautan yang saat ini baru bisa dimanfaatkan hanya 9,2 persen².

Indonesia secara geografis memiliki luas laut sebesar 5,8 juta km² yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0,8 juta km², laut nusantara 2,3 juta km² dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta km². Dari luas tersebut, 50 persen luas wilayah laut Indonesia merupakan daerah perairan pantai (DPP) yang memiliki potensi sangat penting karena sekitar 70 persen sumber daya ikan menghabiskan waktu hidupnya di DPP, dan 90 persen dari hasil biomassa laut berasal dari DPP.

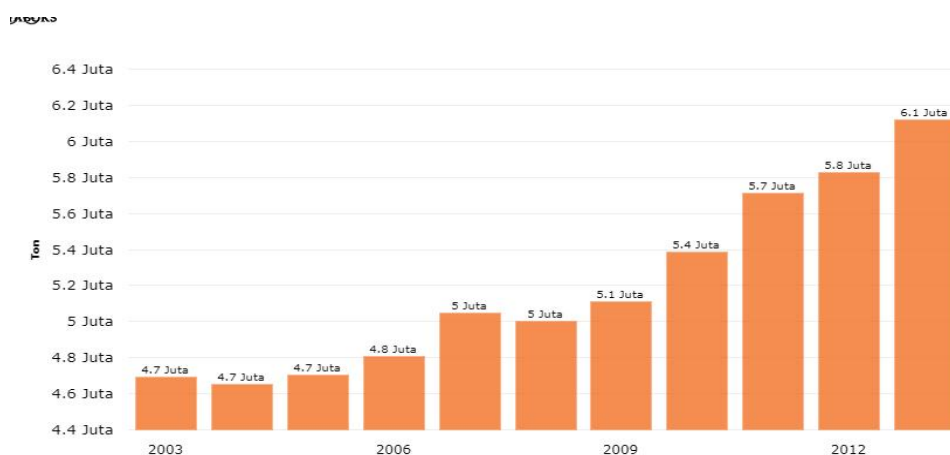
Namun, selama sepuluh tahun terakhir potensi perikanan tersebut tidak sebanding dengan luas dan besarnya kekayaan kelautan yang dimiliki oleh Indonesia, dilihat dari sisi produksi. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa volume produksi perikanan

¹ Kamaluddin, Laode M. 2002. *Pembangunan Ekonomi Maritim Di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal. 75.

² Herdiawan, Didit. 2016. *Kedaulatan Pangan Maritim: Dinamika dan Problematika*. Lembaga Ketahanan Nasional: Jakarta. Hal. 19.

tangkap mengalami kenaikan dari tahun 2003-2013³. Dimana pada tahun 2003, volume produksi perikanan tangkap mencapai 4,7 juta ton, dan meningkat menjadi 6,1 juta ton pada tahun 2013. Besarnya sumberdaya tersebut tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh bangsa Indonesia sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Menurut Gerintya⁴ (Tirto, 10 Agustus 2017), mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia, serta menjadi produsen perikanan laut terbesar. Akan tetapi Indonesia tidak masuk dalam daftar 10 besar pengekspor perikanan dunia. Sebagai produsen perikanan terbesar kedua di dunia, sektor perikanan tidak memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perekonomian. Terbukti kontribusi sektor perikanan hanya berkisar pada angka 2 (dua) persen terhadap PDB Nasional.

Gambar 1.1 Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2003-2013.



Sumber: katadata.co.id (diolah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan)

³ "Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2003-2013". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/05/volume-produksi-perikanan-tangkap-2003-2013>. Diakses: Jum'at, 3 Agustus 2018.

⁴ "Benarkah Ekspor Perikanan Indonesia Kuat?" <https://tirto.id/benarkah-ekspor-perikanan-indonesia-kuat-cuH>. Diakses: Kamis, 16 Agustus 2018. Pukul: 18.27 WIB.

Jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki luas perairan laut, negara kepulauan atau setidaknya negara yang memiliki sumberdaya kelautan. Dapat dilihat bahwa pemanfaatan sumberdaya kelautan terutama perikanan tangkap masih sangat minim. Jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara, Indonesia terbilang masih tertinggal dengan negara seperti Thailand, Vietnam, ataupun Malaysia. Panjang garis pantai yang mencapai 81.000 Km, Indonesia pada tahun 2015 berdasarkan data dari Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), produksi perikanan tangkap mencapai angka 6.056.060 MT (*metric tons*), dengan rata-rata produksi 74,76 MT/Km. Jika dibandingkan dengan Thailand yang memiliki garis panjang pantai sebesar 2.614 Km pada tahun yang sama mencapai angka produksi sebesar 1.317.217 MT, dengan rata-rata produksi 503,90 MT/Km. Sedangkan Vietnam yang memiliki panjang 3,260 Km dengan angka produksi 2.839.900 MT dan rata-rata 871,13 MT/Km.⁵ Terlihat bahwa dengan luasan yang terbatas, kedua negara tetangga tersebut mampu mencapai rata-rata produksi perikanan tangkap melebihi Indonesia sebagai negara maritim.

Akibat dari hal tersebut, nelayan sebagai aktor utama dalam produksi perikanan tangkap menjadi salah satu kelompok yang termiskinkan secara struktural. Dahuri⁶, dalam tulisannya menyatakan sekitar 35 persen nelayan dan pembudidaya ikan masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan rendahnya

⁵ Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC). 2017. *Fishery Statistical Bulletin of Southeast Asia*. Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC): Bangkok. Rata-rata produksi diolah oleh penulis dengan pembagian panjang garis pantai dengan produksi perikanan tangkap dari data SEAFDEC.

⁶ Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MS: Dibalik Potensi Ada Tantangan. <http://www.trobos.com/detail-berita/2018/02/15/45/9910/prof-dr-rokhmin-dahuri-ms-dibalik-potensi-ada-tantangan->. Diterbitkan Senin, 15 Januari 2018. Diakses: Sabtu, 4 Agustus. 2018.

produktivitas, yang disebabkan sebagian besar nelayan masih menggunakan alat atau teknologi penangkapan (kapal dan alat tangkap) ikan tradisional. Senada dengan Dahuri, Julianto dan Munandar⁷, menjelaskan bahwa terhambatnya kesejahteraan kaum nelayan dan yang menyebabkan mereka berkubang dalam kemiskinan dikarenakan: a) sebagian besar nelayan tradisional memiliki karakteristik sosial budaya yang belum kondusif untuk kemajuan dengan 60% dari 3,7 juta nelayan tergolong miskin dan lebih dari 85% nelayan hanya berpendidikan SD, tidak tamam SD dan buta huruf; b) struktur armada penangkapan yang masih didominasi usaha kecil/tradisional dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relatif rendah; c) penanganan pasca panen hasil tangkapan ikan masih buruk; d) BBM, alat tangkap, mesin kapal dan perbekalan serta logistik untuk melaut yang mahal dan cenderung sukar didapatkan nelayan; e) kondisi *overfishing* dan pencuri ikan; dinamika kelembagaan sistem produksi nelayan yang masih tergantung pada aktor non-formal seperti *bakul* atau *langgan* yang menyediakan pinjaman uang kepada nelayan dengan syarat tertentu baik untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari ataupun kebutuhan melaut; serta g) kelembagaan ekonomi formal yang tidak mampu menjangkau atau mengakomodasi kepentingan nelayan sehingga jatuh dalam kelembagaan non-formal yang menuntut bunga tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 merilis data penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta jiwa dan 61,36 persen di antaranya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dan pedesaan⁸. Hal tersebut tentu ironis bagi sebuah negara yang

⁷ Juliantono, Ferry J. Dan Munandar, Aris. *Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturalis*. Jurnal Politik: Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 12 no. 02.2016.

⁸ BPS. 2018. *Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970– 017*. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah->

dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Negara dengan kekayaan sumberdaya kelautan yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

Menyikapi hal tersebut, ada potensi produksi perikanan tangkap yang mampu dimanfaatkan oleh Indonesia jika dikelola secara serius dan benar. Dalam hal ini, untuk meningkatkan produksi perikanan laut (khususnya perikanan tangkap), maka dibutuhkan sarana produksi utama yakni, armada kapal tangkap yang sesuai dengan karakter perairan di Indonesia⁹. Selain itu, program pengadaan armada laut tersebut juga tidak didukung dengan penguatan modal, kelembagaan ekonomi nelayan serta sumberdaya manusia¹⁰. Potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap ialah kapal *illegal fishing* yang dirampas oleh negara melalui keputusan pengadilan.

Selama masa kepemimpinan Ibu Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan telah menenggelamkan 317 kapal

penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html.
Diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 13.00 WIB

⁹ Program Pengembangan Armada Kapal Ikan Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak berjalan dengan baik. Semisal program pengadaan kapal 30 GT (gross ton), tidak berjalan dengan baik, khususnya di daerah-daerah yang memiliki perairan dangkal seperti pesisir laut Sumatra bagian utara. Program pengadaan kapal berberat 30 GT tersebut, banyak yang tidak terpakai karena tidak melihat karakter perairan masing-masing daerah yang membutuhkan jenis kapal dengan berat tertentu.

¹⁰ Seperti yang dilangsir Bisnis.com (24 Februari 2016), Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat proyek 3.325 kapal ikan dengan komposisi kapal berukuran di bawah 5 GT sebanyak 1.020 unit, kapal 5 GT sebesar 1.020 unit, kapal berbobot 10 GT sebanyak 1.000 unit. Selain itu, kapal 20 GT sejumlah 250 unit serta 35 unit kapal berukuran 30 GT. Sebagai contoh kasus, penulis pernah tergabung dalam salah satu organisasi nelayan di DIY. Dalam perkembangan program tersebut, selain tidak mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, juga tidak didukung dengan penguatan kapasitas sumberdaya manusia. Di DIY sendiri, sumberdaya manusia (nelayan) masih sangat kurang dan tidak terlatih. Selain aspek penguasaan teknologi, kebiasaan melaut di perairan jauh pun masih kurang. Dan hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi pengembangan produksi perikanan tangkap di DIY.

sejak Oktober 2014-2017, dan bertambah menjadi 363 kapal *illegal fishing*. Berdasarkan data yang diperoleh, selama 2014-Januari 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan 188 kapal Vietnam, 77 kapal Filipina, 52 kapal Malaysia, 22 kapal Thailand, 19 kapal Indonesia, 2 (dua) kapal Papua Nugini, dan dari negara lain sebanyak 3 (tiga) kapal yang salah satunya dari China. Dari kapal-kapal yang ditangkap tersebut, memiliki kapasitas *tonnase* yang lebih besar dan teknologi tangkap yang lebih canggih daripada nelayan lokal¹¹. Sebagai contoh, penenggelaman kapal Century-4 yang memiliki ukuran 250 GT, Century-7 dengan ukuran 200 GT, keduanya dari Thailand. Kapal terbesar yang pernah ditangkap KKP adalah kapal Hai Fa dengan bobot 4.306 GT, berbendera Panama. Sedangkan ukuran terkecil yang tercatat berukuran 55 GT berbendera Vietnam, dengan nama kapal motor Thanh Cong¹².

Dengan kata lain, pemanfaatan kapal *illegal fishing* diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan. Jika dilihat dari kerugian akibat proses penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Indonesia mengalami kerugian yang diperkirakan oleh World Bank dan FAO, kurang lebih 20 miliar dolar AS atau setara Rp 240 triliun per tahun. Satu kapal pencuri ikan dengan kapasitas 100 GT bisa meraup untung 2-2,5 juta dolar AS per tahun¹³. Pemberantasan *Illegal*

¹¹ <https://katadata.co.id/infografik/2018/01/12/polemik-susi-luhut-soal-kapal-pencuri-ikan>. Diakses: Selasa, 17 Juli 2018.

¹² Nainggolan, Poltak Partogi. 2015. *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis*. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika: Jakarta. Hal. 16-18.

¹³ [Kementerian](#) Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Laut Masa Depan Bangsa: Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: Jakarta. Hal. 13. Lebih lanjut dijelaskan, tangkapan ikan tidak hanya tongkol (pelagis), tapi juga kerang, teripang, dan lobster. Penangkapan ikan di luar kontrol tersebut mengakibatkan kondisi perairan Indonesia dalam kondisi kritis, dengan kode merah untuk sejumlah jenis ikan dan biota laut lainnya (*overfishing*).

Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) pun diperkirakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, melonjak drastis dari sisi produksi perikanan tangkap laut nasional selama semester I 2017. Hasil tangkapan laut mencapai 3,35 juta ton, naik 11,3 persen dibandingkan 3,01 juta ton. Selain itu, dampak lain yang didapat adalah meningkatnya stok tangkapan ikan lestari (*maximum sustainable yield/MSY*) dari 7,31 ton per tahun pada 2013 menjadi 12,54 juta ton tahun 2017¹⁴. Jika penambahan armada kapal perikanan ditambah, maka produksi perikanan akan mampu didorong mendekati angka produksi tersebut jika menggunakan kapal-kapal yang telah disita oleh Negara.

Berdasarkan data dari Kata Data¹⁵ (data diolah dari WCPFC), bahwa *tonnase* kapal penangkap ikan Indonesia paling kecil di Lautan Pasifik. Dari 33 negara yang mendaftarkan kegiatan penangkapan ikan, rata-rata tonase kapal dari Indonesia hanya 76,9 GT. Tidak hanya minim dari sisi ukuran, Indonesia juga mencatatkan jumlah kapal paling sedikit. Data Organisasi Internasional Konservasi Ikan di Lautan Pasifik (WCPFC), jumlah kapal Indonesia hanya 9 unit tidak terpaut jauh dibandingkan Thailand yang mendaftarkan 7 unit kapal. Namun demikian, rata-rata tonase Negeri Gajah Putih ini mencapai 2.760 GT, termasuk kategori kapal paling bongsor diantara negara lain. Bahkan Cina yang termasuk salah satu penghasil ikan terbesar di dunia, mencatatkan 617 kapal dengan tonase rata-rata 453 GT. Beberapa negara lain misalnya Jepang mencatatkan 827 kapal dengan rata-rata tonase 258 GT, Panama 107 kapal dengan rata-rata tonase 5.041 GT. Data tersebut bisa kita jadikan perbandingan, bagaimana kekuatan armada perikanan tangkap di daerah tangkapan

¹⁴ *Ibid.* Hal. 22

¹⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/10/26/tonase-kapal-penangkap-ikan-indonesia-paling-kecil-di-lautan-pasifik>. Diakses: Selasa, 7 Agustus 2018.

perikanan masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain (bukan negara maritim, kecuali Jepang).

Sementara itu, Dahuri (15 Januari 2018) menjelaskan komposisi struktur armada kapal ikan nasional saat ini jumlahnya mencapai 625.633 kapal ikan (terbesar di dunia). Akan tetapi, jumlah kapal ikan modernnya (ukuran di atas 30 GT), hanya sebanyak 3.811 unit (0,6 persen). Sebanyak 165.066 unit (26,4 persen) berupa perahu kecil tanpa motor, yang hanya mampu beroperasi menangkap ikan di perairan laut pesisir di bawah 4 mil laut. Perahu bermotor tempel (*outboard motor*) sebanyak 238.010 unit (38 persen). Dan selebihnya, 218.746 unit (35 persen) berupa kapal motor berukuran di bawah 30 GT¹⁶. Secara tidak langsung, kita membutuhkan armada kapal yang mampu beroperasi di perairan ZEE, dimana pada perairan tersebut adalah habitat jenis ikan pelagis berukuran ekspor dan tingkat laju penangkapannya masih lebih rendah dari potensi produk lestarinya. Mengingat kerentanan terhadap beberapa habitat ikan yang telah mengalami *overfishing* (penangkapan berlebihan), khususnya di wilayah seperti Pantura, Selat Malaka, Selat Bali, dan Selat Sulawesi.

Penelitian ini tidak akan membahas perdebatan antara menteri kelautan dan perikanan dengan Menteri Koordinator Maritim serta wakil Presiden, yang terhadap kapal-kapal yang telah melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Mengingat Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara. Kapal-kapal yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan dapat dihibahkan kepada nelayan kecil dalam rangka pemberdayaan nelayan. Penelitian ini akan coba melihat potensi pengelolaan ataupun

¹⁶ Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MS: Dibalik Potensi Ada Tantangan. <http://www.trobos.com/detail-berita/2018/02/15/45/9910/prof-dr-rokhmin-dahuri-ms-dibalik-potensi-ada-tantangan->. Diterbitkan Senin, 15 Januari 2018. Diakses: Sabtu, 4 Agustus. 2018.

pemanfaatan kapal-kapal tersebut dikelola dalam kerangka memperkuat modal alat kerja nelayan nasional. Dimana penguatan kelembagaan ekonomi, penguatan budaya kelautan, pembangunan unit produksi perikanan daerah, dapat mendorong peningkatan produksi perikanan secara nasional dengan membangun kapasitas aktor utamanya, nelayan tradisional menjadi fokus pada penelitian ini. Seperti yang disampaikan oleh Laode M. Syarif (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi), pemerintah bisa memanfaatkan kapal asing yang merupakan aset hasil sitaan untuk memperoleh tangkapan ikan yang lebih besar dan lebih baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan KKP mengeluarkan peraturan dan mengeluarkan surat permintaan kepada Kementerian Keuangan. Apakah kapal-kapal tersebut akan dimaksimalkan kepada BUMN, dihibahkan ke pemerintah daerah ataupun koperasi nelayan¹⁷.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang termiskinkan secara struktural, dengan angka kemiskinan nasional yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar nelayan belum menerapkan cara-cara penangkapan ikan yang baik, sehingga kualitas ikan yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menurun sehingga harga jualnya menjadi lebih murah. Belum lagi kondisi tersebut diperparah dengan adanya jebakan kemiskinan. Nelayan seringkali terjebak dalam hutang piutang kepada para nelayan darat (pedagang ikan), yang mengharuskan para nelayan laut untuk menjual hasil tangkapannya sesuai standar harga yang ditentukan oleh pemberi hutang. Sehingga untuk mengembalikan modal produksinya guna melaut kembali nelayan tidak dapat terpenuhi, yang pada akhirnya nelayan-nelayan laut tradisional hanya mampu memenuhi kebutuhan

¹⁷ "KPK Restui Kapal Sitaan Bisa untuk Tangkap Ikan". <http://mediaindonesia.com/read/detail/112681-kpk-restui-kapal-sitaan-bisa-untuk-tangkap-ikan>. Diakses: Minggu, 28 Oktober 2018.

hidup mereka sehari-hari dan menyerahkan modal produksi untuk melaut kepada nelayan darat yang memiliki modal lebih besar.

Rantai kemiskinan nelayan tradisional pun terus berputar tiada henti dalam pola produksi tersebut. Dibutuhkan suatu usaha yang lebih jika Pemerintah ingin mengurangi angka kemiskinan nelayan. Tidak hanya mengejar faktor produksi perikanan, tapi Pemerintah harus mampu menciptakan sistem kelembagaan ekonomi yang berkeadilan. Sistem kelembagaan ekonomi yang mampu menopang sisi produksi (peningkatan volume penangkapan ikan), distribusi, dan pembangunan manusianya (nelayan) dalam sistem yang berkeadilan. Rantai kemiskinan struktural pada nelayan harus dihadapi dengan rantai produksi yang terstruktural pula.

Dalam pemikiran ekonomi, individu memiliki kemerdekaan terhadap kebutuhan atas produksi ataupun konsumsi. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, individu tidak bisa dipandang secara terpisah dengan sistem sosial. Sistem sosial ini dalam kerangka ekonomi kelembagaan dimaknai sebagai aturan main, regulasi, atau kesepakatan yang membatasi tindakan individu. Kelembagaan ekonomi ini dimaknai sebagai alat untuk mengatur tindakan manusia dengan cara membatasi perilaku melalui aturan-aturan main yang disepakati. Lembaga dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi biaya transaksi, mengurangi ketidakpastian, internalisasi eksternalisasi, dan menghasilkan manfaat kolektif yang dikoordinasi dalam perilaku kooperatif.

Dalam sistem perekonomian pasar, kita mengenal *liberal market economy system* (LMES) yang dianut oleh negara liberal seperti Amerika. Dimana negara memberikan porsi lebih kepada individu untuk menciptakan peluang usaha dengan sistem rantai pasok saling bersaing. Negara-negara yang menganut sistem pasar seperti ini yang melakukan IUUF di Indonesia adalah Thailand, Panama, dan Malaysia. *Coordinate Market Economy System* (CMES) yang dipraktekkan oleh

Jepang, yang membangun rantai pasok industri skala besarnya dengan membagikan sub-sub produksi dan distribusinya ke perusahaan-perusahaan yang lebih kecil sehingga menciptakan industri yang mampu menopang perekonomian nasional. *Socialist Market Economy System* (SMES) yang dipraktekkan oleh China dan Vietnam. Hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Jepang secara teknis, tapi secara politik sistem tersebut dikendalikan oleh negara guna menciptakan distribusi produksi kepada rakyat. Dan proses tersebut diawasi dan dikendalikan langsung negara.

Melihat apa yang dilakukan negara-negara yang berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang besar dengan dasar perekonomian yang kuat. Maka selayaknya kita juga mampu membangun sebuah sistem rantai pasok produksi ditingkat nelayan. Dalam hal ini, penulis ingin melihat bagaimana dengan pengelolaan kapal-kapal pencuri ikan yang dirampas negara guna mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap, dimana pemanfaatan kapal tersebut juga harus disertai pembentukan sistem rantai pasok yang kuat dan terintegrasi antara proses produksi dan distribusi perikanan.

1.2. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan kapal *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) untuk peningkatan ekonomi nelayan dengan sub-fokus penelitian yakni:

1. Pembangunan sistem kelembagaan ekonomi di tingkat nelayan dalam memanfaatkan kapal rampasan *illegal fishing* guna membangun kelembagaan ekonomi nelayan tradisional;
2. Ketahanan ekonomi nelayan dalam menghadapi pertarungan dengan sistem pasar internasional.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana potensi pengelolaan kapal *illegal fishing* yang telah dirampas negara digunakan untuk mendorong terbangunnya kelembagaan ekonomi nelayan guna meningkatkan ekonomi nelayan”

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana kelembagaan ekonomi nelayan tradisional yang berjalan?
2. Bagaimana ketahanan ekonomi nelayan tradisional dalam menghadapi sistem pasar internasional?
3. Bagaimana potensi pemanfaatan kapal *illegal fishing* yang dirampas oleh negara untuk peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Menganalisis potensi pengelolaan kapal *illegal fishing* yang telah dirampas negara digunakan untuk mendorong terbangunnya kelembagaan ekonomi nelayan guna meningkatkan ekonomi nelayan.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mendalam serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi daerah pada konteks ketahanan daerah. Pengembangan ekonomi daerah akan bermanfaat terhadap tinjauan kesejahteraan sebagai perspektif ekonomi, kedaulatan sebagai perspektif pertahanan dan ketahanan ekonomi sebagai perspektif ekonomi pertahanan. Selain itu, diharapkan dapat

mengembangkan konsep keilmuan ekonomi pertahanan dilihat dari aspek ekonomi dan ketahanan daerah serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi konsep berupa ide dan gagasan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan Kapal Illegal Fishing guna membangun kelembagaan atau sistem ekonomi di tingkat nelayan guna mewujudkan ketahanan ekonomi daerah, khususnya sektor nelayan.